



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : PHN.HN.04.03-35
TENTANG
AKREDITASI ULANG/PERPANJANGAN SERTIFIKASI
BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM
PERIODE TAHUN 2022 s.d. 2024**

Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, maka dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran akreditasi ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 untuk kembali menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027.

I. FORMASI KEBUTUHAN DAN PERSYARATAN

A. FORMASI KEBUTUHAN

Kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum ditetapkan oleh Kepala BPHN, dengan mempertimbangkan :

1. Kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum disetiap Kabupaten/Kota
2. Kabupaten/Kota yang sudah terdapat Pemberi Bantuan Hukum mempertimbangkan jumlah Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi yang ada pada periode sebelumnya

B. PERSYARATAN

1. Terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 s.d. 2024
2. Mengajukan surat permohonan perpanjangan sertifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027
3. Masih memenuhi kriteria sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaan lainnya (Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Tahun 2023 Nomor PHN-HN.04.03-812 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum)

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id.

III. WAKTU PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran **tanggal 15 Juli s.d. 2 Agustus 2024**
- B. Verifikasi kelengkapan dan verifikasi dokumen fisik **tanggal 15 Juli s.d. 5 Agustus 2024**
- C. Perbaikan ketidaklengkapan dokumen **paling lambat selesai tanggal 23 Agustus 2024**
- D. Pemeriksaan faktual lapangan **paling lambat selesai tanggal 12 September 2024**

IV. TAHAP-TAHAP SELEKSI

- A. Pendaftaran Akreditasi Ulang disertai Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat dilakukan secara online melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan menu Akreditasi Ulang;
- B. Pembaruan *data/profile* Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id
- C. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap pembaruan *data/profile* organisasi yang telah diinput oleh Pemberi Bantuan Hukum
- D. Pemeriksaan Dokumen Fisik dilakukan dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, guna melakukan pencocokan antara dokumen pembaruan *data/profile* yang diisi pada aplikasi dengan dokumen asli atau fotokopi yang telah di legalisir

- E. Pemeriksaan Faktual Lapangan dilakukan melalui survei lapangan terhadap kantor atau sekretariat yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing
- F. Penetapan Akreditasi dilakukan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan Kelengkapan Dokumen, pemeriksaan Dokumen Fisik, pemeriksaan Faktual Lapangan dan direkomendasikan oleh Kelompok Kerja Daerah kepada Panitia Verifikasi dan Akreditasi melalui Kelompok Kerja Pusat
- G. Rekomendasi dari Kelompok Kerja Daerah dilakukan verifikasi kembali oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dibantu Kelompok Kerja Pusat guna menetapkan kelolosan sebagai Pemberi Bantuan Hukum
- H. Pemberi Bantuan Hukum yang dinyatakan lolos direkomendasikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027
- I. Pemberian sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Januari 2024

Ketua Panitia Verifikasi dan Akreditasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
- Febranto (082364216203), Hermansyah (082176947596)